



Kebijakan Pemerintah Tiongkok terhadap Konflik Uyghur dan Han: Studi Kasus Konflik Xinjiang di Tiongkok

Francisca Meancilla

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The Xinjiang conflict is one of the internal conflicts that occurred in China. As a developed country, China is very vulnerable to conflict. This Xinjiang conflict is a conflict between ethnic Uyghurs and Han who later grew into a separatist movement. The ethnic Uyghurs escalated hostilities with the Chinese government and there were several separatist movements in Xinjiang that sparked the Chinese government's response. Meanwhile, the Chinese government will not release Xinjiang and will keep the territorial integrity. This study discusses to explain the main causes of the Xinjiang conflict and this conflict is still happening today. This study uses qualitative research methods, with the type of explanatory research because it is needed to explain why conflicts between Uyghurs and Han can occur. Using content analysis techniques that focus on Chinese government policies towards the Uyghur. By using the concept of Michael E. Brown about the causes of internal conflict. These causes are the underlying causes (Main Causes) and Proximate Causes (Additional Causes). Through this concept it was found that this conflict was not caused by just one factor which was released by four main factors relating to politics, economics, and culture. One of the reasons for this conflict is the Chinese state's interest in Xinjiang which is a potential region.

Keywords: *Conflict, Xinjiang, China, cause of conflict, Uyghur ethnic*

PENDAHULUAN

Xinjiang adalah suatu daerah otonom dalam wilayah Tiongkok yang penduduknya kebanyakan orang Turki, berbicara dengan beberapa dialek Turki, terutama suku Uyghur. Sejak Xinjiang masuk ke dalam wilayah Tiongkok, diskriminasi banyak diterima Muslim Uyghur. Bukan hanya disebabkan perbedaan agama dan budaya tetapi juga bentuk fisik yang berbeda.

Perbedaan etnisitas yang terjadi di Tiongkok antara Uyghur dan Han menyebabkan adanya diskriminasi dan menimbulkan sensitifitas pada sistem pemerintahan di Tiongkok. Salah satu contoh kebijakan Tiongkok yaitu migrasi etnis Han ke Urumqi yang merupakan ibukota Xinjiang menyebabkan banyak etnis Uyghur kehilangan pekerjaan dan mengalami penurunan dalam perekonomian. Dari segi pendidikan, pemerintah Tiongkok juga memutuskan untuk membatasi kurikulum pendidikan yang mengajarkan bahasa dan kebudayaan asli Uyghur.

Konflik Uyghur dan Han mengalami eskalasi pada tahun 2009, dimana terjadi kerusuhan antara minoritas etnis Uyghur dengan etnis Han di Urumqi, Xinjiang. Kerusuhan Urumqi pada 5 Juli 2009 ini dimulai dari adanya insiden yang terjadi seminggu sebelumnya di sebuah pabrik mainan di timur kota Shaoguan yang terletak di provinsi Guangdong. Para pekerja dari etnis Han menganiaya para pekerja Uyghur hingga terdapat 2 orang yang tewas dan 61 lainnya terluka akibat adanya rumor pemerkosaan gadis Han yang dilakukan oleh pemuda Uyghur. Akibat dari peristiwa tersebut, banyak etnis Uyghur menyerang pusat-pusat bisnis etnis Han dan orang-orang Han di jalanan.

Kerusuhan ini berlanjut hingga 6 Juli 2009, namun kali ini etnis Han yang menguasai jalanan dan melakukan sabotase kepada pusat-pusat ekonomi etnis Uyghur seraya meneriakkan seruan untuk menyerang etnis Uyghur. Pada tanggal 5 dan 6 September 2009 demonstrasi kembali dilakukan oleh etnis Han di Urumqi sebagai balasan atas kerusuhan yang dilakukan oleh etnis Uyghur.

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan kebijakan Tiongkok terhadap Uyghur sehingga menimbulkan konflik antar Uyghur dan Han. Menjelaskan apa saja kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Tiongkok.

Kemudian penelitian ini akan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya konflik antara etnis Uyghur dan etnis Han. Pada penelitian ini penulis akan menggunakan konsep segitiga konflik dan konflik internal. Sebuah konflik dapat dilihat sebagai sebuah segitiga, dengan kesenjangan sikap dan perilaku pada puncak-puncaknya (Galtung, 2004). Melalui segitiga konflik ini, penulis bisa melihat bahwa dalam sebuah konflik yang tidak selaras, kontradiksi ditentukan oleh pihak-pihak yang bertikai, hubungan mereka, dan benturan kepentingan yang melekat antara mereka dalam berhubungan. Sedangkan dari konsep konflik internal dibagi menjadi dua aspek yang merupakan faktor penyebab konflik tersebut terjadi, yakni *Underlying Causes* yang merupakan faktor utama yang menyebabkan konflik, dan *Proximate Causes* yang merupakan faktor pemicu konflik (Brown, 2001).

PEMBAHASAN

Dinamika Konflik Suku Uyghur dan Suku Han

Pada tahun 1884, Xinjiang secara resmi dinyatakan sebagai provinsi. Pada saat itu merupakan rumah bagi mayoritas suku Uyghur yang besar, dengan komunitas yang lebih kecil dari orang-orang Asia Tengah, serta migran Han dan Hui dari provinsi Tiongkok ke timur. Mayoritas Uyghur tinggal di wilayah Xinjiang yang strategis dan penting. Lalu pada tahun 1955, Daerah Otonomi Xinjiang Uyghur didirikan, dan suku Uyghur ditetapkan sebagai kebangsaan resmi.

Pada 1990-an, pemerintah Xinjiang menekankan pengembangan bagian utara wilayah di mana pondasi industri lebih baik. Karena mayoritas Muslim Uyghur tinggal di Xinjiang selatan, perkembangan yang tidak seimbang secara geografis ini jadi membuat suku Uyghur semakin dirugikan dalam kesejahteraan. Untuk mengurangi kesenjangan ekonomi utara-selatan ini, Beijing telah mendorong BUMN skala besar seperti PetroChina dan Sinopec untuk berinvestasi di Xinjiang selatan sejak akhir 1990-an. Tetapi hal itu hanya memperbesar kesenjangan ekonomi antara Han dan Uyghur, BUMN ini lebih suka mempekerjakan pekerja Han untuk keterampilan teknis mereka (Dwyer, 2005). Perusahaan-perusahaan ini juga tidak membayar pajak pendapatan kepada pemerintah Xinjiang, tetapi ke Beijing atau Shanghai.

Untuk mendorong pembangunan dan mengintegrasikan Xinjiang secara lebih penuh ke Tiongkok, pemerintah mencoba berbagai program, salah satunya adalah migrasi etnis Han ke

Xinjiang. Dilansir dari *Council on Foreign Relations*, suku Han membentuk sekitar 6,7% dari populasi Xinjiang pada tahun 1949 dan 40% pada tahun 2008. Han menjadi golongan istimewa sebagai karyawan di perusahaan energi negara, kepala berbagai lembaga pemerintah dan secara besar-besaran di tentara dan kepolisian.

Faktor yang menyebabkan konflik internal Xinjiang berdasarkan penjelasan dinamika di atas adalah karena ketidakpuasan, kemiskinan, dan juga ketidakstabilan. Interaksi tersebut jadi menciptakan sebuah permasalahan yang rumit dan kemudian menciptakan lingkungan yang mendukung bagi terbentuk dan berkembangnya konflik Xinjiang.

Eskalasi konflik terjadi pada 5 Juli 2009, Xinjiang menyaksikan kerusuhan besar-besaran di ibu kota Urumqi dengan jumlah korban yang sangat tinggi. Pada hari itu, ratusan orang Uyghur di Urumqi pergi untuk memprotes kematian dua pekerja Uyghur di sebuah pabrik di Tiongkok Selatan, dan demonstrasi segera berubah menjadi kerusuhan mematikan (Dillon, 2004). Mungkin frustrasi dengan pasukan polisi yang mencoba menghentikan demonstrasi, banyak pemrotes menyerang warga sipil tak berdosa, yang secara khusus menargetkan warga Tiongkok Han. Menurut ABC Australia, total 197 orang tewas akibat kerusuhan, mayoritas dari mereka adalah etnis Han.

Kebijakan Pemerintah Tiongkok Terhadap Etnis Uyghur

Tiongkok sampai saat ini terus mempertahankan *One China Policy*. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan utama Tiongkok adalah kedaulatan, sehingga tentu Tiongkok tidak akan membiarkan terlepasnya satu wilayah pun dari Tiongkok. Xinjiang bernilai sangat ekonomis, terutama sejak penemuan ladang minyak yang menambah posisi Xinjiang secara geoekonomi lebih penting dan merupakan wilayah paling krusial bagi Tiongkok. Dilansir dari *HKTDC Research*, Xinjiang juga merupakan penghasil terbesar kapas dan lavender. Pemerintah Tiongkok tentu tidak mau melepaskan wilayah ini begitu saja.

Hui dan Uyghur adalah dua kelompok Muslim terbesar di Tiongkok, keduanya memiliki lebih dari 10 juta orang. Islamofobia dan permusuhan umum terhadap Muslim di Tiongkok telah dimulai pada 1990-an. Setelah kejadian terror bom WTC 9/11 Amerika Serikat melancarkan perang melawan terorisme yang mencapai domestik dan internasional, sehingga memberi Tiongkok alasan untuk membenarkan tindakannya sendiri terhadap ancaman yang dirasakan dari separatis Uyghur sebagai bagian dari gerakan global yang lebih besar.

Dilarang memanjangkan jenggot bagi para pria, dan dilarang menggunakan kerudung bagi wanita di depan publik adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Tiongkok terhadap Uyghur. Semakin menguatnya isu-isu mengenai ekstremisasi, maka pemerintah Tiongkok semakin ketat dalam mengawasi kegiatan beragama bagi para Muslim. Tak berhenti di situ, para Uyghur juga dilarang menjalankan puasa pada bulan Ramadhan (Armandhanu, 2016).

Kebijakan lainnya yaitu kebijakan bahasa terbuka RRC, termasuk bahasa pendidikan dan standardisasi, kebijakan terselubung untuk akulturasi dan asimilasi minoritas telah menjadi lebih menonjol, sebagaimana tercermin dalam penggunaan wacana baru-baru itu yang mencirikan gerakan nasionalis Uyghur sebagai teroris. Kebijakan bahasa asli RRC di wilayah perbatasannya, yang integrasionis tetapi tidak asimilatif, didirikan dengan baik dan umumnya diterima oleh pejabat partai maupun oleh kelompok minoritas nasional sendiri. Namun dimulai pada pertengahan 1980-an, Beijing mulai bergeser dari akomodasi budaya ke arah kebijakan asimilasi yang terang-terangan.

Dalam usaha pemerintah untuk mengimplementasikan konsep nasionalisme, ternyata tidak seluruh masyarakat yang berada di Tiongkok adalah keturunan Tiongkok. Pemerintah

Tiongkok berusaha menerapkan nasionalisme tanpa mempedulikan adanya perbedaan etnis. Meski begitu kenyataannya nasionalisme yang dimiliki Tiongkok sangat erat dengan etnik tertentu, contohnya Han. Di satu sisi, pemerintah perlu menyatukan nasionalisme untuk mendapat identitas negara, tetapi di satu sisi hal itu sangatlah erat dengan mayoritas di Tiongkok. Karena Han adalah mayoritas di Tiongkok, maka kebijakan pemerintah akan lebih cenderung dengan identitas mereka (Dwyer, 2005).

Tanggapan Internasional Terhadap Konflik Uyghur

Sejak bangsa Uyghur mulai melancarkan gerakan kemerdekaan atau separatis, di mata para pemimpin Tiongkok hal ini sudah menjadi alasan yang cukup untuk menindak mereka secara keras. Ketika Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya mengecam atas perbuatan Tiongkok terhadap Uyghur, justru sebaliknya dengan negara-negara mayoritas Muslim yang mendukung Tiongkok. Kritik terhadap Tiongkok soal pelanggaran HAM terhadap bangsa Uyghur kebanyakan datang dari negara barat (Hermanto, 2012).

Dilansir dari *The Guardian* (2019) Iran misalnya tidak melayangkan kritik terhadap kebijakan Tiongkok. Tiongkok adalah importir terbesar minyak dari Iran, banyak berinvestasi di sektor migas dan aktif melebarkan hubungan dagang dengan Iran. Pakistan dan Arab Saudi juga bungkam atas alasan ekonomi. Pangeran Muhammad bin Salman bahkan memuji kebijakan minoritas Tiongkok dan hal serupa diungkapkan berbagai negara Arab. Dalam hal ini pun hubungan ekonomi menjadi faktor penentu.

Penyebab Utama Pemerintah Tiongkok Melakukan Diskriminasi Terhadap Uyghur

Konflik merupakan hubungan yang muncul karena adanya kontradiksi (*contradiction*) antara sikap (*attitude*) dan perilaku (*behavior*). Menurut Galtung dan Fischer (2013: 46) ketiga hal itu bisa disebut dengan istilah segitiga konflik, dimana kontradiksi dalam suatu kondisi konflik yang berawal dari adanya ketidaksamaan tujuan yang dirasakan oleh pihak-pihak yang bertikai. Dua pihak yang bertikai adalah pihak Tiongkok dan Uyghur. Kedua pihak ini jelas memiliki perbedaan dari banyak aspek, mulai dari budaya, bahasa, kepercayaan, kebiasaan, dan pola hidup lainnya.

Attitude merupakan cara pihak yang berkonflik merasakan dan berpikir terhadap konflik yang berkaitan. Kekuasaan Uyghur pada akhirnya banyak dikendalikan oleh sekretaris jenderal daerah partai Komunis Tiongkok dan bukan oleh gubernur setempat. Di bawah pemerintahan Partai Komunis, terjadi pembangunan ekonomi yang sangat gencar, dan banyak warga Tiongkok dari bagian timur yaitu Han masuk dan mencari penghidupan layak di wilayah Uyghur ini. Kemampuan yang memadai dan lebih terlatih serta kemampuan bahasa Mandarin yang baik mendorong pemuda dari golongan Han lebih banyak mendapatkan pekerjaan.

Kekerasan langsung seperti contohnya Pemerintah Tiongkok selama ini bersikap cukup keras dalam menyikapi berbagai kerusakan di Xinjiang. Pemerintah memilih agar persoalan etnis minoritas di Xinjiang itu dieliminasi secara agresif melalui agresi militer. Berbagai realisasi kebijakan tersebut antara lain terjadinya genosida, "*ethnic cleansing*", bahkan wanita dan anak-anak menjadi korban (Dwyer, 2005). Tidak berhenti di situ, kekerasan kebudayaan mungkin salah satu kekerasan yang sangat terlihat. Mulai dari kebijakan bahasa nasional yang cukup bisa membuat orang menilai bahwa adanya asimilasi terselubung di Xinjiang.

Empat faktor penyebab konflik internal menurut Brown (2006: 577) diantaranya, pertama, faktor struktural misalnya karena lemahnya legitimasi politik, kedua, faktor politik misalnya diskriminasi politik, kebangsaan warga negara, dan etnis nasionalisme, ketiga, faktor ekonomi yaitu menyangkut masalah ekonomi ataupun diskriminasi sistem ekonomi, keempat, faktor kebudayaan misalnya adanya diskriminasi budaya atau mengucilkan kaum minoritas.

Masalah konflik internal ini menjadi sangat penting karena pada titik tertentu konflik internal yang biasanya bersifat intra *state* dapat berkembang menjadi konflik inter. Dalam konteks Tiongkok, konflik intra yang sulit diselesaikan cenderung akan mengundang keterlibatan aktor diluar negara yaitu negara tetangga Tiongkok seperti Asia Selatan dan Asia Tengah.

Tiongkok merupakan salah satu peradaban tertua di dunia. Oleh sebab itu Tiongkok memiliki catatan sejarah yang sangat panjang dan dinamika konflik yang cukup rumit. Mulai dari kondisi perekonomian Tiongkok yang kacau-balau seusai Perang Dunia II, dimana terjadi inflasi besar-besaran pada kurun waktu 1946-1947. Ditambah lagi, semakin kuatnya Partai Komunis dan dijatuhkannya Kekaisaran Tiongkok pada tahun 1949 (Wicaksono, 2017). Ketika struktur negara melemah, tindak kekerasan akan sering terjadi. Organisasi kriminal menjadi lebih kuat dan menyebar. Perbatasan yang dikendalikan juga kurang efektif.

Pemerintah Tiongkok cenderung memiliki kekuatan bersikap untuk menyerang daripada bertahan. Melalui para militer, mereka melakukan penyerangan secara nyata kepada masyarakat sipil yaitu etnis Uyghur. Sejak saat itu, situasi di Xinjiang mencekam dan sering terjadi perselisihan antara suku Uyghur dan suku Han.

Pada dasarnya, diskriminasi politik yang terjadi antara etnis Uyghur dan etnis Han karena politik identitas masing-masing yang semakin kuat. Mereka mengartikannya sebagai relasi kekuasaan dalam suatu masyarakat yang berdasarkan kultur, keturunan, ras, agama, dan bahasa. etnis Uyghur yang merasa mendapatkan perlakuan sewenang-wenang tidak hanya dari pemerintah dan militer tetapi juga dari elit-elit lokal Xinjiang sehingga pada akhirnya mereka melakukan perlawanan. Selain itu, konsep keamanan nasional yang digunakan militer dan kepolisian lebih mengupayakan untuk memaksakan dominasi pemerintahan yang dikuasai oleh etnis Han menimbulkan konflik yang cukup berat di Xinjiang karena adanya tujuan dari etnis Uyghur sebagai penduduk lokal untuk menghidupkan kembali kebudayaan asli dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Faktor ekonomi yang menjadi sebab utama dalam suatu konflik internal adalah: masalah ekonomi; sistem perekonomian yang diskriminatif; dan pembangunan ekonomi dan modernisasi. Ekonomi merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam suatu negara untuk menentukan nasib suatu negara di masa depan. Saat suatu negara mengalami permasalahan ekonomi maka akan lebih rentan terhadap konflik. Dilansir dari *China Congressional-Executive Commission*, sekitar tahun 1950 pemerintah Tiongkok memberlakukan kebijakan migrasi domestik etnis Han ke wilayah Xinjiang. Migrasi etnis Han menyebabkan banyak etnis Uyghur kehilangan pekerjaan dan jatuh dalam kemiskinan.

Dalam kasus ekstrim, upaya kejam untuk mengasimilasi populasi minoritas dikombinasikan dengan program untuk membawa sejumlah besar kelompok etnis lain menjadi minoritas yang merupakan bentuk genosida budaya. Tiongkok tidak pernah mengakui etnis Uyghur sebagai bagian dari etnis Tiongkok, melainkan etnis keturunan Turki. Disamping memang mereka keturunan Turki dan bahasa sehari-hari yang digunakan juga adalah dialek Turki. Tidak hanya pemerintah Tiongkok yang mengintimidasi mereka, tetapi juga para militer dan masyarakat sipil seperti Han yang mengekspose gerakan anti Islam. Upaya asimilasi terselubung juga dilakukan oleh pemerintah dengan memindahkan banyak etnis Han ke Xinjiang sehingga kebudayaan Uyghur semakin hari semakin berkurang dari peradaban di Xinjiang.

KESIMPULAN

Konflik merupakan gejala yang senantiasa hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat *inheren* artinya konflik akan selalu ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana

saja dan kapan saja. Di dalam setiap kehidupan sosial tidak ada satu pun manusia yang memiliki kesamaan yang persis, baik dari unsur etnis, kepentingan, kemauan, kehendak, tujuan dan sebagainya.

Konflik Xinjiang merupakan konflik yang terjadi antara dua etnis yang berbeda. Dari tabel konflik internal Brown (2006: 577) beberapa faktor penyebab konflik ini adalah faktor struktural bagaimana keadaan negara sedang lemah dan adanya kekhawatiran tentang keamanan internal khususnya saat Xinjiang membuat kelompok separatisme. Kedua, adanya faktor politik yaitu diskriminasi dalam hal beribadat dan lainnya. Adanya ketidakpuasan, kemiskinan, kekerasan, dan juga ketidakstabilan yang dialami etnis Uyghur telah menciptakan sebuah kombinasi permasalahan yang kompleks dan kemudian menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terbentuk dan berkembangnya konflik Xinjiang. Ketiga adalah faktor ekonomi berupa kesenjangan ekonomi antara etnis Han dengan etnis Uyghur serta modernisasi dan pembangunan ekonomi yang sangat cepat di Xinjiang. Lalu yang keempat adalah faktor kebudayaan yang secara historis melahirkan kenyataan adanya perbedaan identitas mendasar antara Tiongkok dengan etnis Uyghur keturunan Turki.

Rangkaian ketiga aspek dinamika konflik interpersonal yang diambil dari teori Segitiga ABC Konflik Galtung mempengaruhi cara penyelesaian konflik dan membentuk satu pola dinamika konflik interpersonal dan kecenderungan penyelesaiannya. Sikap keras pemerintah Tiongkok dalam menyelesaikan masalah di Xinjiang semakin memperburuk konflik di Xinjiang. Pada akhirnya muncul gerakan separatis Uyghur. Pemerintah Tiongkok justru semakin bertindak keras dan akhirnya terjadi konflik dan pertumpahan darah di Xinjiang.

Kepentingan utama Tiongkok adalah kedaulatan dan menjaga keutuhan wilayah, sehingga tentu Tiongkok tidak akan membiarkan terlepasnya satu wilayah pun dari Tiongkok. Sikap pemerintah yang sangat menentang keras separatisme di Xinjiang ini antara lain disebabkan karena memang Xinjiang bernilai sangat strategis dan ekonomis.

REFERENSI

- Afrido, R. (2013). *Kemendagri Klaim, Eskalasi Peristiwa Konflik Terus Meningkat*. <http://nasional.sindonews.com/read/2013/09/09/15/780926/kemendagriklaim-eskalasi-peristiwa-konflik-terusmeningkat>. Diunduh pada 3 November 2019
- Aini, N. (2019, Juli 16). *Saudi dan 36 Negara Dukung Tindakan Cina Atas Muslim Uighur*. <https://internasional.republika.co.id/berita/pupr49382/saudi-dan-36-negara-dukung-tindakan-cina-atas-muslim-uighur>. Diunduh pada 1 September 2019
- Brown, M. E. (2001). *Ethnic and Internal Conflict: Causes and Implication*. Washington D.C: United State Institute of Peace.
- Brown, M. E. (2006). *The Causes and Regional Dimensions of Internal Conflict*. London: The Centre for Science and International Affairs.
- Dillon, M. (2013). *Xinjiang: China's Muslim Far Northwest*. London: Routledge.
- Dwyer, A. M. (2005). *The Xinjiang Conflict: Uyghur Identity, Language Policy, and Political Discourse*. East-West Center Washington.
- Ethnic Groups in Xinjiang*. (n.d.). <http://www.fom.sg/Ethnic%20Groups%20in%20Xinjiang.pdf>. Diunduh pada 29 November 2018
- Galtung, J. (2004). *Transcend and Transform: An Introduction to Conflict Work*. Pluto Press.
- Galtung, J. (1990). *Peace and Conflict, Development and Civilization*. London: International Peach Research Institute.

- Galtung, J., & Fischer, D. (2013). *Pioneer of Peace Research*. London: Springer.
- Hammond, K. A. (2019, Mei 24). *The history of China's Muslims and what's behind their persecution*. <https://theconversation.com/the-history-of-chinas-muslims-and-whats-behind-their-persecution-117365>. Diunduh pada 17 Juni 2019
- Xinjiang: Market Profile*. (2019, Mei 20). HKTDC RESEARCH: <http://china-trade-research.hktdc.com/business-news/article/Facts-and-Figures/Xinjiang-Market-Profile/ff/en/1/1X000000/1X06BVVK.htm>. Diunduh pada 23 Oktober 2019